



Sosialisasi Pencegahan Money Politik Dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Kalimantan Selatan

Socialization of Prevention of Political Money in Facing the 2024 Regional Head Election in South Kalimantan

Khairullah Anshari ^{1*}, Rizky Subhan ², Junaidy ³, Muhammad Halim ⁴, Ahmad Fitry ⁵

¹²³⁴⁵ FISIP Administrasi Publik Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, Indonesia

Alamat: Jl. Adhyaksa No.2, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123

Korespondensi penulis: khairullahanshari@gmail.com

Article History:

Received: Juli 16, 2024

Revised: Agustus 19, 2024

Accepted: September 13, 2024

Published: September 14, 2024

Keywords: Money Politics, Socialization, Community Service

Abstract: Community service activities with a focus on preventing the practice of money politics among South Kelayan community leaders. Money politics often undermines the integrity of elections and democracy, especially at the local level. In this context, we carry out a series of educational and outreach activities for community leaders to increase their understanding of the negative impacts of money politics and strategies for preventing it. The approach used involves seminars and discussions involving community leaders, youth and political party cadres. The results of this program show increased knowledge and commitment of community leaders in rejecting money politics and playing an active role in promoting clean and fair elections. During program implementation and provide recommendations for more effective money politics prevention efforts in the future. It is hoped that this experience can become a model for other regions facing similar problems, as well as contribute to strengthening local democracy and the integrity of general elections in Indonesia.

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan fokus pada pencegahan praktik money politics di kalangan tokoh masyarakat Kelayan Selatan. Money politics, atau politik uang, sering kali merusak integritas pemilihan umum dan demokrasi, terutama di tingkat lokal. Dalam konteks ini, kami melaksanakan serangkaian kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada tokoh masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang dampak negatif money politics dan strategi pencegahannya. Pendekatan yang digunakan melibatkan seminar dan diskusi yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan kader partai politik. Hasil dari program ini menunjukkan peningkatan pengetahuan dan komitmen tokoh masyarakat dalam menolak money politics dan berperan aktif dalam mempromosikan pemilihan yang bersih dan adil. Selama pelaksanaan program dan memberikan rekomendasi untuk upaya pencegahan money politics yang lebih efektif di masa mendatang. Pengalaman ini diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain yang menghadapi masalah serupa, serta berkontribusi pada penguatan demokrasi lokal dan integritas pemilihan umum di Indonesia.

Kata Kunci: Money Politik, Sosialisasi, Pengabdian Masyarakat

1. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang dihasilkan dari Pemilu diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Pemilu pun menjadi tonggak tegaknya demokrasi, di mana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk satu periode pemerintahan kedepan. Pemilu merupakan salah

satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda dinegara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai para kandidat atau politikus selaku komunikator politik.

Dalam perjalanannya pelanggaran Pemilihan Umum masih terjadi di Indonesia salah satunya adalah money politic (politik uang). Di Indonesia praktik money politic (politik uang). merupakan salah satu pelanggaran Pemilihan Umum yang paling sering terjadi. Money politic atau yang sering disebut juga dengan politik uang masih menjadi kasus yang menarik untuk dikaji lebih mendalam lagi dalam implementasi proses pelaksanaan demokrasi di Negara Indonesia khususnya pada saat dilaksanakannya Pemilihan Umum. Money politic atau jual beli suara pada dasarnya adalah membeli kedaulatan rakyat, hal ini dikarenakan rakyat yang menerima uang sebenarnya telah menggadaikan kedaulatannya untuk jangka waktu tertentu.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpin dan perwakilan yang mereka anggap paling sesuai. Namun, di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, tantangan besar yang sering muncul adalah praktek money politics atau politik uang. Money politics merujuk pada penggunaan uang atau barang sebagai imbalan untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Hal ini tidak hanya mencederai prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga dapat merusak integritas dan kualitas pemerintahan.

Menurut berbagai studi dan laporan, money politics sering kali terjadi menjelang pemilu dengan tujuan untuk memperoleh suara secara cepat dan mudah. Dampak dari praktek ini sangat merugikan, mulai dari merendahkan kualitas demokrasi, memperburuk kesenjangan sosial, hingga memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik dan pemilu itu sendiri. Selain itu, money politics dapat memperburuk korupsi dan mengabaikan kebutuhan serta aspirasi rakyat yang sebenarnya.

Tentu saja politik uang akan berdampak buruk bagi pemilu dan penguatan demokrasi di Indonesia. Selain pembodohan terhadap pemilih, persaingan antar kandidat atau peserta (parpol) akan menjadi lebih timpang. Partai politik yang memiliki banyak uang berpotensi lebih besar memenangkan pemilu. Dalam cakupan yang sangat luas, politik uang akan memicu korupsi sebelum pemilihan (untuk mengembalikan modal politik) dan pasca pemilihan (mengembalikan modal atau mengakomodir para penyumbang/donator). Politik uang juga menyebabkan terjadinya pemborosan ongkos politik karena belum tentu efektif

meningkatkan suara karena pemilih tidak benar-benar mengenal partai/calon yang membagikan uang saat kampanye atau tahapan pemilu lainnya.

Praktik politik uang merupakan persoalan yang menjadi keprihatinan publik akademisi dan penggiat demokrasi karena bukan saja merusak tatanan demokrasi yang hendak dibangun akan tetapi juga menyebabkan etika dalam masyarakat yang menjunjung nilai-nilai kebersamaan (partisipasi) dan kejujuran mengalami dekadensi. Bahkan praktik politik uang telah kuat mengakar dalam proses demokrasi mulai dari pemilihan umum hingga pemilihan kepala desa di berbagai tempat di Indonesia. Para pengamat politik memandang bahwa praktik uang yang banyak terjadi di desa-desa tidak lepas dari karakteristik masyarakat desa yang ditandai dengan kehidupan yang masih tradisional, pendidikan yang rendah, dan miskin. Logika bahwa pemimpin merupakan pelayan rakyat dalam hal ini dijungkirbalikkan, sehingga diciptakan sebuah konstruksi masyarakat dimana masyarakat memiliki ketergantungan terhadap pemimpin. Akan tetapi ketergantungan tersebut dibentuk melalui praktik jual beli kepercayaan masyarakat melalui mekanisme pemilihan kepala desa atau pemilihan kepala daerah dan juga pemilihan umum. (Sri Wahyuni, 2023)

Dalam konteks ini, sosialisasi pencegahan money politics menjadi sangat penting. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bahaya money politics serta cara-cara untuk melawannya. Pengetahuan dan kesadaran yang tinggi dapat membantu masyarakat untuk tidak terjebak dalam praktek tersebut dan berpartisipasi secara aktif dalam proses pemilu dengan cara yang etis dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, pengabdian masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan tentang pencegahan money politics merupakan langkah strategis untuk memperkuat demokrasi dan memastikan bahwa pemilu dilakukan dengan cara yang bersih dan adil. Kegiatan ini tidak hanya memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam menjaga integritas pemilu serta mendukung pembangunan demokrasi yang lebih berkualitas dan berkeadilan.

2. METODE

a. Tempat

Kegiatan sosialisasi ini berlangsung di ruang rapat kantor kelurahan kelayan selatan kota Banjarmasin, kalimantan selatan.

b. Waktu kegiatan

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada pukul 09.30 wita sampai selesai. Pada

saat kegiatan ini berlangsung selama 2 jam, yang mana persentasi pemaparan materi dari panitia selama 15 menit, sisanya diadakan diskusi bersama peserta.

c. Peserta kegiatan

Yang menjadi peserta dalam pengabdian masyarakat adalah para tokoh masyarakat yang berada di kelurahan kelayan selatan.

d. Capaian kegiatan

Pengabdian masyarakat ini diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi tokoh masyarakat di kelayan selatan, besar harapan kami para tokoh masyarakat ini agar bisa mensosialisasi ke warga lainnya. Secara khusus kegiatan ini memberikan pemahaman dan berdiskusi tentang strategi-strategi menghindari money politik dalam pemilu 2024.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahap awal kegiatan panitia pengabdian masyarakat melakukan koordinasi ke kantor kelurahan kelayan selatan. Di sana kami di sambut baik oleh lurah beserta jajarannya, kami dari tim menyampaikan ingin mengadakan sosialisasi tentang pencegahan money politik dalam memasuki pemilihan kepala daerah di Banjarmasin. Menurut Lurah Bpk Muhammad Aplan tema yang diangkat sangat menarik dan layak untuk di sosialisasikan kepada tokoh masyarakat di kelurahan kelayan selatan dan beliau juga memfasilitasi ruangan untuk diadakannya sosialisasi ini.

Selanjutnya tim menyiapkan materi dan menentukan tanggal 10 agustus 2024 kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan. Pada saat pelaksanaan materi diberikan selama 15 menit yang mana berisikan konsep money politik, dampak money politik serta bagaimana upaya pencegahannya. Secara keseluruhan tokoh masyarakat merasakan dampak positif dari kegiatan ini. Selama kegiatan sosialisasi berlangsung, pemateri menekankan mengenai bagaimana pentingnya menyadari sikap anti politik uang dan anti golput dalam kontestasi politik. Selain itu, dijelaskan pula secara teori mengenai definisi, bentuk, faktor dan juga strategi pencegahan dari kedua fenomena tersebut.



Gambar 1. sesi penyampaian materi

Setelah penyampaian materi selanjutnya diskusi dengan tokoh masyarakat. Diskusi berlangsung sangat atraktif dan para tokoh masyarakat sangat antusias dalam menyampaikan apresiasinya terhadap pemilu kepala daerah tahun 2024 ini. Dalam kesempatan ini mengajak warga untuk menjadi pemilih yang cerdas tidak terpengaruh oleh apapun termasuk pemberian serangan fajar yang umumnya dilakukan dengan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai. Bentuk dari politik uang tidak harus berbentuk pemberian uang dalam amplop saja, namun pemberian sembako antara lain beras, minyak dan gula untuk masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk pihak yang menarik juga termasuk dalam politik uang yang harus dihindari oleh masyarakat.



Gambar 2. sesi diskusi

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya politik uang ini menurut (Imawan, 2016) diantaranya adalah: Pertama, faktor minimnya kedekatan partai politik dengan masyarakat. berdasarkan survey yang dilakukan oleh indikator Politik Indonesia bahwa sebanyak 85,5 persen masyarakat tidak memiliki kedekatan dengan partai politik. Hal ini disebabkan karena kedekatan yang rendah inilah yang menyebabkan mereka lebih mudah terlibat dalam permainan politik uang. Kedua, tingkat pendidikan seseorang juga sangat mempengaruhi keterlibatan seseorang dalam politik uang, semakin tinggi tingkat intelegensi seseorang maka dia akan lebih cerdas memilih pemimpin dan terlepas dari politik uang. Ketiga, di Indonesia merupakan Negara yang memiliki tingkat kesejahteraan cukup rendah. Inilah biasanya yang menjadi faktor utama seseorang terjebak dalam politik uang, karena akan mudah diiming-imingi keuntungan yang sesaat. Selain itu, (Rifai, 2019) suburnya politik uang (money politics) itu juga tidak lepas dari cara pandang masyarakat pemilih yang permisif terhadap politik uang itu. Pada proses demokrasi di Indonesia, termasuk demokrasi di level pemilihan kepala desa. Praktek money politics tumbuh subur, karena dianggap suatu kewajiban masyarakat tidak peka terhadap bahayanya. Dengan membiarkannya karena tidak merasa bahwa money politics secara normatif adalah perilaku yang harus di jauhi.

4. KESIMPULAN

Money politik merupakan suatu hal yang bisa berdampak merusak demokrasi pemilu di negara Indonesia. Sebagai warga yang baik kita harus bisa menjunjung nilai-nilai dari demokrasi agar selama lima tahun kedepan kita akan mendapatkan pemimpin yang benar-benar bisa membawa ke arah yang lebih baik. Masyarakat harus ikut terlibat dalam pengawasan pemilu ini jadi tidak hanya tugas Banwaslu saja. Pengawasan yang aktif dari masyarakat menjadi pilar penting lahirnya sebuah pemilu yang demokratis serta tugas masyarakat bisa juga menjadi controlling terhadap penyelenggara pemilu.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Besar harapan kami kegiatan ini bisa berdampak positif bagi masyarakat di kelurahan kelayan selatan. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada lurah kelayan selatan yang telah memfasilitasi acara ini.

DAFTAR REFERENSI

- Imawan Sugiharto. 2016. Rekonstruksi Penegakan Hukum Politik Uang dalam pemilihan Kepala Daerah Berbasis Hukum Progresif, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume III No. 1
- Rifai, Amzulian .2019. Pola Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sri Wahyuni, Agus Riwanto, Achmad, Sunny Ummul Firdaus. 2023. Pemberdayaan Desa Anti Politik Uang Untuk Menciptakan Pilkada Berintegritas. Kadarkum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 Juni 2023 Hal 9-20